

TESIS

**PENGARUH *RISK MANAGEMENT* DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN
FRAUD DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI
PEMODERASI**

***THE EFFECT OF RISK MANAGEMENT AND INTERNAL
CONTROL SYSTEM ON FRAUD PREVENTION WITH
INFORMATION TECHNOLOGY AS MODERATING***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
Disusun dan diajukan oleh

**ANDI ALFIAN FIRSYAM
A062221005**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENGARUH *RISK MANAGEMENT* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PEMODERASI

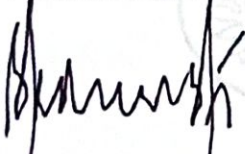
Disusun dan diajukan oleh

ANDI ALFIAN FIRSYAM
A062221005

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 24 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

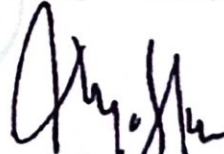
Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196509251990022001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196503071994031003

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196811251994122002



Ketua Program Studi
Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Andi Alfian Firsyam
NIM : A062221005
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Magister (S2)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**Pengaruh *Risk Management* dan Sistem Pengendalian Internal
terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Teknologi Informasi sebagai
Pemoderasi**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juni 2024
Yang membuat pernyataan,



Andi Alfian Firsyam

PRAKATA



Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **Pengaruh *Risk Management* dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi.**

Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Andi Firdaus dan Ibunda Andi Syamsuani atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang, cinta dan dukungan moral maupun materil kepada penulis yang tulus tanpa pamrih, serta kepada adek Andi Alfriani Rianti terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan. Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing I dan Bapak Prof. Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi, dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang

sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, SE., MM., Ak., CPMA, Ibu Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA, Ibu Dr. Rahmawati H.S, SE., Ak., M.Si., CA selaku tim penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis mulai proses ujian proposal sampai pada penyelesaian tesis ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf lingkup Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Kepada pimpinan, staf, dan seluruh auditor di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan kesempatan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian
7. Teman-teman Magister Akuntansi angkatan 20221 terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Makassar, Juni 2024



Andi Alfian Firsyam

ABSTRAK

ANDI ALFIAN FIRSYAM. *Pengaruh Risk Management dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dengan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi* (dibimbing oleh Mediaty dan Syamsuddin).

Banyaknya kasus *fraud* pada sektor pemerintahan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Fungsi auditor internal untuk mencegah *fraud* menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *risk management* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, penelitian ini menyelidiki peran moderasi pengaruh teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sampel penelitian sebanyak 44 auditor. Metode penyampelan yang digunakan adalah metode nonprobabilitas dengan menggunakan teknik penyampelan jenuh. Hipotesis diuji pada tingkat signifikansi lima persen. Data dianalisis menggunakan *structural equation model* (SEM) dengan aplikasi *partial least square* (PLS) 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *risk management* dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Selain itu, teknologi informasi tidak dapat memoderasi pengaruh *risk management* dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Kata kunci: *risk management*, sistem pengendalian internal, teknologi informasi, pencegahan *fraud*



ABSTRACT

ANDI ALFIAN FIRSYAM. *The Effect of Risk Management and Internal Control System on Fraud Prevention with Information Technology as Moderating* (supervised by Mediaty and Syamsuddin)

The increasing number of fraud cases in the government sector in Indonesia is very concerning. The function of internal auditors in preventing fraud has become crucial. This study aims to analyze the impact of risk management and internal control systems on fraud prevention. In addition, the study investigates the moderating role of information technology. The research was conducted at the Regional Inspectorate of South Sulawesi Province. Data collection was carried out using a questionnaire. The research sample consisted of 44 auditors. The method used was non-probability sampling with a saturated sampling technique. Hypotheses were tested at a five percent significance level. Data were analyzed using Structural Equation Model (SEM) with Partial Least Square (PLS) 3.0 application. The results of the study indicate that risk management and internal control systems have a positive effect on fraud prevention. Furthermore, information technology cannot moderate the effect of risk management and internal control systems on fraud prevention.

Keywords: risk management, internal control systems, information technology, fraud prevention



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	12
2.1.2 <i>Fraud Triangle Theory</i>	13
2.1.3 <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	15
2.1.3 Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud Prevention</i>).....	16
2.1.4 <i>Risk Management</i>	18
2.1.5 Sistem Pengendalian Internal.....	20
2.1.6 Teknologi Informasi.....	23
2.2 Tinjauan Empiris.....	25
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	33
3.1 Kerangka Konseptual.....	33
3.2 Hipotesis.....	37
BAB IV METODE PENELITIAN	45
4.1 Rancangan Penelitian.....	45
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46

4.3	Populasi dan Sampel.....	46
4.3.1	Populasi.....	46
4.3.2	Sampel	46
4.4	Jenis dan Sumber Data	47
4.4.1	Jenis Data.....	47
4.4.2	Sumber Data	47
4.5	Metode Pengumpulan Data.....	47
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	48
4.6.1	Variabel Penelitian	48
4.6.2	Definisi Operasional	49
4.7	Instrumen Penelitian	50
4.8	Teknik Analisis Data	51
4.9	Pengujian Instrumen Penelitian.....	52
4.9.1	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	52
4.9.2	Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	53
BAB V	HASIL PENELITIAN	55
5.1	Deskripsi Data.....	55
5.2	Karakteristik Responden Penelitian	56
5.3	Analisis Statistik Deskriptif.....	58
5.4	Analisis Hasil Dengan Menggunakan SEM-PLS	59
BAB VI	PEMBAHASAN	78
6.1	Pengaruh <i>Risk Management</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	78
6.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> ...81	
6.3	Pengaruh <i>Risk Management</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dimoderasi oleh Teknologi Informasi	84
6.4	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dimoderasi oleh Teknologi Informasi	86
BAB VII	PENUTUP.....	89
7.1	Kesimpulan	89
7.2	Implikasi	90
7.3	Keterbatasan Penelitian	92
7.4	Saran Penelitian.....	92
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN		101

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Definisi Operasional	49
Tabel 5.1 Tingkat Pengambilan Kuesioner	55
Tabel 5.2 Karakteristik Responden	56
Tabel 5.3 Dasar Interpretasi Skor Item Dalam Variabel Penelitian	58
Tabel 5.4 Statistik Deskriptif	59
Tabel 5.5 Deskripsi Indikator Variabel <i>Risk Management</i>	61
Tabel 5.6 Deskripsi Indikator Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	62
Tabel 5.7 Deskripsi Indikator Variabel Teknologi Informasi.....	64
Tabel 5.8 Deskripsi Indikator Variabel Pencegahan <i>Fraud</i>	65
Tabel 5.9 Hasil Uji Validitas Konvergen	68
Tabel 5.10 Perbaikan Validitas Konvergen	69
Tabel 5.11 <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	70
Tabel 5.12 Hasil <i>Cross Loading</i>	71
Tabel 5.13 <i>Fornell-Lacker Criterion</i>	72
Tabel 5.14 Hasil Pengujian Realibilitas	73
Tabel 5.15 <i>R-Square</i> Konstruksi Variabel.....	74
Tabel 5.16 Uji Hipotesis	76
Tabel 5.17 Uji Hipotesis Berdasarkan <i>Effect Moderasi</i>	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Factor Analysis of TAM Items	15
Gambar 3.1 Kerangka Pikir	36
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual	37
Gambar 5.1 <i>Path Diagram</i>	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	102
--------------------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ekonomi dan teknologi saat ini bukan hanya berdampak besar terhadap kemajuan suatu negara, namun juga bisa menjadi penghalang jalan akibat penipuan yang dibuat oleh pihak-pihak dalam mencari keuntungan keuangan secara langsung. Baik di sektor swasta maupun publik, *fraud* meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan mengingat urgensi penanganan *fraud*, jelas bahwa auditor diperlukan di setiap lembaga bisnis dan pemerintah (Hartan & Waluyo, 2016).

Kecurangan (*fraud*) dan kekeliruan (*error*) adalah dua kategori utama kesalahan akuntansi. Kesalahan yang disengaja dengan motif tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan merugikan pihak lain disebut *fraud*. Sedangkan tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja tanpa adanya keinginan untuk menguntungkan diri sendiri disebut *error* (Jefri & Mediaty, 2014; Mediaty et al., 2020; Pamungkas, 2022; Wahidahwati & Asyik, 2022).

Fraud adalah masalah tersembunyi yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi. Korupsi sering dikaitkan dengan *fraud* akuntansi. Korupsi terkadang berbentuk suap, konflik kepentingan, hadiah terlarang sebagai ucapan terima kasih, dan pemaksaan ekonomi (Shintadev, 2015). *Fraud* merupakan sebuah masalah yang mengancam di dunia (Marsuni et al., 2022). Dampak korupsi sangatlah besar, dan itu serius dalam hal keamanan masyarakat dan sudah seharusnya menjadi kewajiban bersama seluruh komponen negara tanpa pengecualian (Indah et al., 2021). *Fraud* di lingkungan pemerintahan tidak berkurang, bahkan terus bergema dan mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama menjadi korban

fraud dan baik pegawai pemerintah tingkat tinggi maupun rendah pun ikut terlibat (Mande et al., 2020).

Hasil survey *Assosiation of Certified Fraud Exeminers* (ACFE) memperlihatkan skema penipuan yang paling umum di kawasan Asia-Pasifik adalah korupsi sebanyak 57% (ACFE, 2022). Hasil survey ICW (*Indonesia Corruption Watch*) di tahun 2022 ternyata ada 579 kasus dengan kerugian sebesar Rp 42,747 triliun. Tren APH dalam penindakan kasus korupsi 2018 sampai 2022 cenderung naik turun. Meski demikian, tren nilai kerugian negara justru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan jabatan, pegawai pemerintah daerah paling banyak dengan 365 kasus. Selain itu ICW juga menunjukkan bahwa pelaku korupsi terbanyak adalah Apartur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di instansi pemerintah daerah (ICW, 2022). Pencegahan *fraud* sangat penting dilakukan karena dengan kasus-kasus yang telah terjadi selama tahun 2022 telah memberikan kerugian sampai triliunan. Selain itu berdasarkan ACFE (2022) ternyata rata-rata 50% lebih kerugian *fraud* tidak kembali. Khusus di Asia Pasifik kerugian *fraud* yang tidak kembali sebesar 49%.

Berdasarkan pemetaan korupsi pada wilayah berdasarkan jumlah kasus dan kerugian negara. Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 13 kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 67,4 miliar (ICW, 2022). Selain itu terdapat beberapa kasus korupsi di Sulawesi Selatan yang melibatkan pemerintah daerah. Seperti kasus korupsi yang terjadi di PDAM kota Makassar tahun 2017. Kemudian di tahun 2021 adanya kasus korupsi proyek rumah sakit batua Makassar sebesar Rp 22 miliar. Dan pada tahun 2022 kasus korupsi Honorarium Satpol PP Makassar sebesar Rp 3,5 miliar. Adanya kasus tersebut, pihak Inspektorat memiliki peran penting dalam melakukan proses pengauditan atau pemeriksaan atas laporan keuangan klien yang kemudian akan memberikan opini terkait laporan keuangan tersebut.

Di Indonesia, Inspektorat yang juga dikenal dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah auditor internal pemerintah. Auditor internal pemerintah berfungsi untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Pengawasan bertujuan untuk menjamin tercapainya kebijakan dan rencana yang hemat, efisien, dan efektif oleh pemerintah (Kamal, 2022). Pada penelitian ini Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menjadi fokus penelitian ini karena merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang mengawasi kegiatan pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Selain merumuskan dan menetapkan kebijakan, inspektorat provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah Kabupaten atau Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Banyak upaya untuk mencegah praktik kecurangan yang telah dilakukan, dengan harapan praktik kecurangan dapat diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya adalah mencegah kecurangan dengan menerapkan manajemen risiko, yang menggambarkan bahwa risiko adalah suatu konsep yang menggambarkan suatu ketidakpastian, atau suatu kejadian atas kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam mencapai tujuan (Susilo & Kaho, 2018). *Risk management* dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menutup kesenjangan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, sehingga mengurangi kemungkinan karyawan terlibat dalam aktivitas fraud (Kassem & Higson, 2012; Pence et al., 2016).

Risk Management sebagai metode dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko di seluruh organisasi dan memanfaatkan peluang yang terkait dengan pencapaian tujuan mereka (Mishra et al., 2019). *Risk management* berperan dalam membantu instansi pemerintah untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang mengancam pencapaian

tujuannya dan menentukan langkah-langkah penanganan risiko. Tujuan penerapan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang terkait dengan bidang yang dipilih ke tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat diakibatkan oleh berbagai bahaya lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Sebaliknya, pelaksanaan manajemen risiko memerlukan penggunaan seluruh sumber daya manusia, terutama entitas manajemen risiko (manusia, staf, dan organisasi) (Dharmawati et al., 2022).

Risk Management adalah faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (Kwatingtyas, 2017). *Risk Management* terdiri dari manajemen risiko operasional, manajemen risiko keuangan, manajemen risiko hukum. Ada tujuh alat pencegahan korupsi yang digunakan untuk mengelola risiko keuangan seperti organisasi harus memiliki struktur dan sistem pengelolaan keuangan yang dapat dikelola, memastikan integritas dan efisiensi prosedur penganggaran dan perencanaan keuangan, mengadopsi aturan dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik, menciptakan dan menerapkan pengendalian keuangan yang ketat dan efektif, penguatan kapasitas sistem audit internal, penerapan peraturan dan prosedur yang transparan dan efektif mengenai audit eksternal, dan memastikan transparansi keuangan dan pelaporan publik secara berkala (Kopanchuk et al., 2021). Dengan memahami peraturan dalam penilaian risiko berdasarkan undang-undang, maka pencapaian manajemen risiko akan terjamin sehingga hal ini akan berkontribusi pada pencegahan *fraud* (Lisnawati & Apollo, 2020).

Pengaruh *risk management* terhadap pencegahan *fraud* didukung oleh teori *stewardship*, yang menyatakan bahwa auditor, yang bertindak sebagai *steward*, bertanggung jawab untuk memastikan kepuasan pemerintah atau masyarakat yang berperan sebagai *principal*. Dalam konteks ini, auditor melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko yang terkait dengan

pengelolaan dana publik, serta melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala. Semua tindakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan bebas dari risiko yang dapat mengakibatkan terjadinya fraud, sehingga dapat memenuhi harapan pemerintah atau masyarakat.

Berbagai penelitian telah mencoba membuktikan *risk management* mempengaruhi pencegahan *fraud*. Namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian (Safkaur, 2023; Salawu et al., 2023; Alazzabi et al., 2019) menemukan *risk management* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sebaliknya (Iwan Putra, 2023; Nadirah & Setiawan, 2022) menemukan *risk management* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaan hasil dari penelitian ini, membuka peluang penelitian lebih lanjut untuk membuktikan dan menjelaskan pengaruh *risk management* terhadap pencegahan *fraud*.

Selain *risk management*, keefektifan sistem pengendalian internal juga sangat penting dalam mencegah *fraud*. Menurut PP No. 8 Tahun 2006, sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Sedangkan *Committee of sponsoring organization* (COSO) pada tahun 1992 mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas

Kelemahan sistem pengendalian internal dapat menjadi faktor utama terjadinya *fraud*. Pengawasan yang buruk dan proses dokumentasi yang tidak tepat memberikan peluang untuk menyalahgunakan aset, yang paling buruk jika melibatkan beberapa orang yang bekerja sama untuk melakukan malpraktik ilegal tersebut. Untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang lemah, yang pada akhirnya akan mengurangi peluang terjadinya kecurangan (Zakaria,

2016). Mekanisme pengendalian internal yang memadai dan kuat di tempat kerja adalah salah satu cara ampuh untuk mengurangi terjadinya penyelewengan aset di tempat kerja (Koomson et al., 2020).

Sistem pengendalian internal termasuk faktor yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (Taufik, 2019). Sistem pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Sistem pengendalian internal dalam lingkungan pengendalian, sosok pemimpin menjadi hal yang penting (Aquila et al., 1998). Dalam penelitian Shonhadji & Maulidi (2019), memperlihatkan keteladanan pemimpin menjadi aspek dari lingkungan pengendalian yang paling berpengaruh dalam mencegah terjadinya sebuah *fraud*. Hal ini karena adanya efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*), dimana pemimpin akan mempunyai pengaruh besar yang cenderung akan diikuti oleh pegawai ditempat tersebut. Keteladanan pemimpin akan menunjukkan komitmennya melalui perilaku dan tindakan untuk membangun tempat kerja menjadi lebih baik (Onesti & Palumbo, 2023). Sehingga hal ini dapat mencegah kecurangan.

Setiap organisasi menghadapi berbagai risiko yang berasal dari sumber eksternal dan internal. COSO mengatakan penilaian risiko merupakan kunci penting bagi tata kelola perusahaan yang efektif. Organisasi dapat mencegah *fraud* dengan lebih baik jika mereka secara aktif mengevaluasi dan menilai risiko dan kelemahan mereka terhadap *fraud* (Venter, 2007) dalam penelitian (Tarjo et al., 2022). Aktivitas penilaian risiko dan pemantauan merupakan ukuran efektif untuk mengendalikan aktivitas organisasi dan berpotensi dapat mendiagnosis potensi risiko (*fraud*) yang menghambat pencapaian tujuan organisasi (Shonhadji & Maulidi, 2019). Aspek-aspek tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan jika organisasi ingin mencegah penyebaran berbagai potensi ancaman. Penerapan sistem pengendalian internal pada kontrol aktivitas seperti pemisahan tugas

organisasi yang tepat juga merupakan salah satu model pencegahan yang efektif (Peltier, 2018). Informasi dan komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi akurat, tepat waktu, dapat diakses, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan transparansi (Niyi et al., 2023).

Sistem pengendalian internal dapat digunakan untuk mencegah terjadinya *fraud*. Hal ini sejalan dengan *fraud triangle theory* didefinisikan sebagai gagasan dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan atau menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi seseorang melakukan tindakan penipuan (Donald R Cressey, 1953). Berdasarkan teori ini terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang digambarkan dalam *fraud triangle*. Dharmawati et al., (2022) mengemukakan dari ketiga faktor tersebut, kesempatan (*opportunity*) merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisasi melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap kecurangan. Menurut Albrecht et al., (2011) ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan tindakan *fraud*, antara lain kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi *fraud*, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi *fraud* serta kurangnya jejak audit. Tindakan kecurangan tersebut dapat dicegah dengan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif.

Berbagai penelitian telah mencoba membuktikan sistem pengendalian internal mempengaruhi pencegahan *fraud*. Namun masih terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian (Taufik, 2019; Ohoiway, 2023; Salawu et al., 2023; Fahmi et al., 2023) menemukan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sebaliknya (Kartini, 2015; Oduro & Cromwell, 2018; Herawaty & Hernando, 2020; Indra et al., 2020; Widhiastuti et al., 2020)

menemukan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Perbedaan hasil dari penelitian ini, membuka peluang penelitian lebih lanjut untuk membuktikan dan menjelaskan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Berbagai teknologi informasi dapat diimplementasikan dalam bentuk e-government, e-audit, e-procurement. Dalam bidang pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Salah satu bagian dari implementasi e-government adalah sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Sistem informasi tersebut terintegrasi dari daerah hingga pusat merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat (Djou et al., 2024). Penggunaan teknologi informasi yang berinteraksi dengan sistem informasi dalam mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data pada berbagai cara dalam menghasilkan informasi berkualitas (Aji, 2005; O'Brien, 2005).

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Taufik (2019) yang meneliti mengenai "*the effect of internal control system implementation in realizing good governance and its impact on fraud prevention*". Model penelitian ini menggunakan model replikasi. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu variabel independen pada penelitian sebelumnya menggunakan *good governance*, sedangkan untuk penelitian ini menggunakan variabel *risk management*. Perbedaan lain dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya menggunakan *good governance* sebagai variabel mediasi, sedangkan penelitian ini menggunakan teknologi informasi sebagai pemoderasi. Alasan menggunakan teknologi informasi sebagai pemoderasi karena teknologi informasi dianggap penting karena sangat membantu dalam melakukan berbagai analisis dan pengumpulan bukti (Arifuddin et al., 2022). Selain itu, dengan teknologi informasi

sebagai variabel moderasi proses manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dapat berjalan dengan lebih baik melalui pengumpulan data yang akurat, penyajian informasi yang relevan, dan penyediaan layanan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Namun jika teknologi informasi menjadi variabel independen hanya akan berperan sebagai satu elemen terpisah tanpa memberikan dampak signifikan pada efektivitas keseluruhan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Berbagai penelitian telah mencoba membuktikan teknologi informasi dapat mempengaruhi *risk management* terhadap pencegahan *fraud*. Namun masih terhadap perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian (Izzaty et al., 2022; Tanuwijaya, 2023; Sudarmanto et al., 2022) menemukan bahwa teknologi informasi memperkuat pengaruh *risk management* terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Taherdoost, 2021) menemukan bahwa teknologi informasi dapat memperlemah *risk management* terhadap pencegahan *fraud*. Selain *risk management*, ada juga sistem pengendalian internal. Berbagai penelitian telah mencoba membuktikan teknologi informasi dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Namun masih terhadap perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian (Abbaszadeh et al., 2019; Ohoiway, 2023; Abiola, 2013) menemukan bahwa teknolog informasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yaya, 2019) menemukan bahwa teknologi informasi melemahkan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengkaji penelitian dengan judul “Pengaruh *Risk Management* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* dengan Teknologi Informasi sebagai Pemoderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan sebagai berikut:

1. Apakah *risk management* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah teknologi informasi memoderasi pengaruh *risk management* terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah teknologi informasi memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *risk management* terhadap pencegahan *fraud*
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi dalam memoderasi *risk management* terhadap pencegahan *fraud*
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh teknologi informasi dalam memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang auditing. Penelitian ini menguji beberapa teori yang menjadi dasar hubungan antar variabel. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur tentang pencegahan *fraud* dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan kebijakan untuk meningkatkan pencegahan *fraud* oleh auditor internal pemerintah di Inspektorat.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan informasi dan pembandingan bagi topik penelitian tentang *risk management*, sistem pengendalian internal, teknologi informasi serta pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stewardship* (*Stewardship theory*)

Stewardship theory menguraikan situasi di mana manajer tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi namun bekerja demi kebaikan perusahaan. Teori *stewardship* didasarkan pada psikologi dan sosiologi dan dimaksudkan untuk mendorong manajer menjalankan tugasnya sebagai *steward*, dengan memprioritaskan pemenuhan tujuan *principal*. Teori ini ditujukan untuk para peneliti dalam menguji situasi ketika manajer sebagai *steward* dalam organisasi akan termotivasi dalam bertindak secara terbaik untuk *principal* (Donaldson & Davis, 1991).

Menurut Hu & Alon (2014) teori *stewardship* didasarkan pada asumsi filosofis bahwa manusia pada dasarnya bisa dipercaya, bisa bertindak dengan tanggung jawab, dan mempunyai kejujuran serta integritas untuk pihak lain. Teori *stewardship* bisa digunakan di penelitian akuntansi pada organisasi sektor publik, seperti lembaga pemerintah yang awalnya akuntansi sektor publik ditujukan dalam mencukupi kebutuhan informasi untuk hubungan *steward* dengan *principal*. Seiring dengan berkembangnya spesialisasi akuntansi dan pertumbuhan organisasi sektor publik, mendorong transaksi menjadi lebih kompleks. Ketika tuntutan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik meningkat, situasinya menjadi lebih kompleks dan semakin sulit bagi *principal* sendiri untuk menjalankan fungsi pengelolaan.

Model of man dalam *stewardship theory* didasari ketika *steward* yang bekerja dalam kelompok, kolaborasi untuk utilitas yang tinggi, dan terus siap melayani. Mempunyai opsi berdasarkan bertindak demi kepentingan pribadi atau

bertindak dengan cara yang baik bagi organisasi. *Steward* mengenali tarik menarik antara kebutuhan individu dan tujuan serta keyakinan organisasi dan mengintegrasikannya adalah cara untuk memenuhi kebutuhan individu. Di sisi lain, pilihan *steward* dibatasi oleh gagasan bahwa kepentingan mereka yang berkontribusi pada organisasi lebih besar dibandingkan mereka yang bertindak secara individu dan menunjukkan perilaku yang mementingkan diri sendiri. *Steward* yakin kepentingan mereka sejalan dengan kepentingan organisasi. Maka dari itu akan memiliki motivasi untuk mempunyai utilitas yang diarahkan langsung ke organisasi dan tidak untuk tujuan pribadi. Hal ini terjadi karena teori *stewardship* mengasumsikan pada saat kepentingan *steward* dan *principal* merupakan konvergensi yaitu keduanya memiliki arah yang sama dalam sebuah hal yaitu kesejahteraan organisasi. Ketika manfaat organisasi terwujud, maka manfaat individu juga terwujud.

Teori ini mengasumsikan bahwa auditor yang bertindak sebagai *steward* akan memberikan kepuasan kepada pemerintah atau masyarakat yang bertindak sebagai *principal*. Auditor melakukan identifikasi dan mengevaluasi risiko terkait pengelolaan dana publik, melakukan pemantauan dan pemeriksaan berkala. Tujuan dari semua itu untuk memastikan bahwa dana publik dikelola bebas dari risiko yang dapat menimbulkan fraud. Sehingga hal ini dapat memenuhi harapan dari masyarakat atau pemerintah.

2.1.2 *Fraud Triangle Theory*

Fraud triangle theory ialah sebuah gagasan untuk mengamati penyebab terjadinya kecurangan. Teori ini diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1953). Menurut teori tersebut, ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan penipuan yang dapat didefinisikan sebagai segitiga penipuan. Ketiga faktor tersebut adalah; (1) *preassure* ialah Hal yang menjadi alasan mengapa beberapa individu atau kelompok melakukan penipuan karena adanya tekanan.

Tekanan tersebut berasal dari adanya permasalahan yang dihadapi oleh kelompok atau individu tertentu yang tidak memungkinkan mereka berinteraksi dengan lingkungan. (2) *opportunity* ialah peluang untuk terlibat dalam praktik penipuan, karena situasi memungkinkan. Karena lemahnya pengendalian internal, kurangnya standar peraturan yang baik di lembaga-lembaga, tingginya tingkat otoritas dan peraturan perundang-undangan yang buruk di beberapa negara, terdapat peluang terjadinya penipuan. (3) *rationalization* ialah ketika pelaku yang melakukan penipuan akan membenarkan tindakan penipuannya secara etis karena mempunyai tekanan situasi yang cukup valid sehingga semua kejahatan menjadi normal. Pelaku penipuan dapat memberikan berbagai pembenaran atas tindakannya. Ketiga elemen ini yang bisa terjadi kapan saja merupakan bahan dasar yang harus diawasi secara ketat dari sudut pandang manajemen. Prosedur, praktik, dan pengendalian yang efektif harus ditetapkan oleh Pemerintah dengan tujuan mencegah atau mendeteksi penipuan.

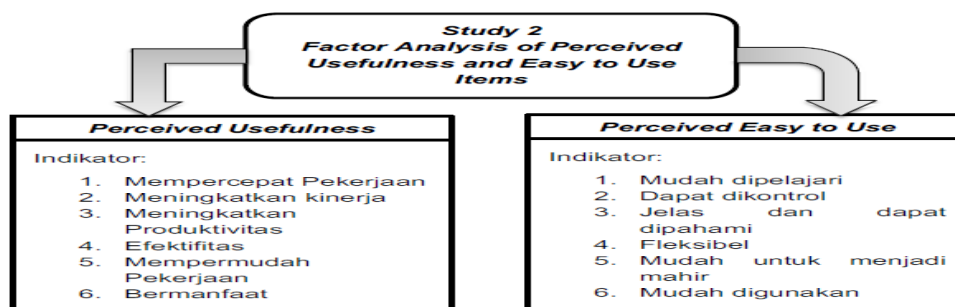
Berdasarkan teori ini terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang digambarkan dalam fraud *triangle*. Dharmawati et al., (2022) mengemukakan dari ketiga faktor tersebut, kesempatan (*opportunity*) merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisasi melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap kecurangan. Menurut Albrecht et al., (2011) ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan tindakan fraud, antara lain kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi fraud, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi *fraud* serta kurangnya jejak audit. Tindakan kecurangan tersebut dapat dicegah dengan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif.

2.1.3 Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model (TAM) atau model penerimaan teknologi merupakan suatu kerangka kerja yang dibuat untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang berperan dalam adopsi teknologi komputer oleh pengguna. Davis (1989) pertama kali mengemukakan konsep ini. *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan olehnya telah terbukti efektif dan secara luas diterima sebagai alat untuk memprediksi penerimaan terhadap teknologi yang baru diperkenalkan.

Menurut Davis (1989), *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah suatu teori sistem informasi yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna memahami dan menerapkan suatu teknologi informasi. *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam formulasi awalnya oleh Davis (1989) mencakup persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), sikap (*attitude*), niat perilaku (*behavioral intention*), penggunaan aktual (*actual use*), serta beberapa dimensi tambahan seperti pengalaman (*experience*) dan kompleksitas (*complexity*).

Dari keenam konstruksi tersebut, ada dua faktor yang memiliki pengaruh utama terhadap sistem teknologi atau sistem informasi. Faktor pertama adalah persepsi akan manfaat atau kemudahan, sementara faktor kedua adalah persepsi kegunaan dalam penggunaan teknologi. Indikator TAM menurut Davis (1989) seperti pada



Gambar 2.1 Factor Analysis of TAM Items (Davis, 1989).

2.1.4 Pencegahan Kecurangan (*Fraud Prevention*)

International Standard On Auditing 240 memberikan defenisi *fraud* adalah aktivitas yang dilakukan terus-menerus dari satu dan lebih anggota manajemen, mereka mempunyai tanggungjawab atas karyawan, tata kelola, atau seringkali ketiganya, termasuk penggunaan kecurangan untuk memperoleh keadilan dan memperoleh laba ilegal. Sedangkan menurut Arens et al., (2015) *fraud* adalah setiap upaya yang disengaja untuk menipu dengan maksud mencuri harta. *Fraud* didefinisikan oleh *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) adalah setiap tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan untuk menipu, baik untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, baik yang dilakukan oleh orang dalam maupun pihak di dalam atau di luar organisasi. Selain itu, ACFE membagi *Fraud* menjadi tiga “tipologi” berbeda tergantung pada karakteristiknya:

a. *Aset Misappropriation Asset*

Penyalahgunaan aset mencakup penggunaan yang salah dan pencurian langsung atas properti perusahaan atau pihak lain. Dan karena terlihat atau dapat diukur/dihitung (nilai yang ditentukan), maka ini merupakan jenis penipuan yang sangat mudah dideteksi.

b. *Fraudulent Statements*

Kecurangan pelaporan terjadi ketika pejabat tinggi perusahaan atau pemerintah dengan sengaja memberikan gambaran yang salah tentang situasi keuangan perusahaan atau pemerintah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan atau pemerintah.

c. *Corruption*

Korupsi adalah bentuk kecurangan yang biasa terjadi di negara-negara berkembang dimana faktor integritas masih dipertanyakan akibat Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran mengenai tata kelola pemerintahan

yang baik. *Fraud* jenis ini sulit diidentifikasi. Hal ini melibatkan penyuapan, pemberian yang melanggar hukum, dan pemerasan sumber daya keuangan.

Standar of Auditing Standar (SAS) No.99, *Concideration of Fraud in Fianacial Statement Audit* dan Arens, et.al. (2014) mengenalkan konsep *fraud triangle* sebagai penyebab terjadinya *fraud*. Tindakan kecurangan terjadi karena adanya seperangkat kondisi yang kondusif bagi pelaku. Seperangkat kondisi tersebut dikenal sebagai kondisi penyebab terjadinya kecurangan (*condision of fraud*). Donald R Cressey, (1953) memberikan koonsep *fraud triangle theory* terdiri dari tiga kondisi umum, yaitu: (1) *pressure*, faktor pendorong munculnya motif ini adalah karena kebutuhan ekonomi, gaya hidup, serta tekanan pihak lain yang menyebabkan seseorang terdorong melakukan tindakan *fraud*; (2) *opportunity*, faktor pendorong munculnya peluang disebabkan karena lemahnya sistem pengendalian internal, kepercayaan terhadap tugas seseorang yang terlalu luas dan berlebihan, minimnya pelatihan dan supervisi, tidak memadainya program dan kebijakan anti *fraud*, dan (3) *rationalization*, tindakan mencari pembenaran sebelum melakukan tindakan kecurangan dimana pembenaran tersebut dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan perbuatan yang salah.

Menurut Taufik (2019) Pencegahan *fraud* juga dapat dilakukan dengan pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik, penguatan sistem pengendalian internal pemerintah dan tata kelola yang baik. Sedangkan Albrecht et al (2011) Pencegahan *fraud* merupakan suatu proses untuk mencegah terjadinya *fraud* yang dapat dilakukan melalui fokus pada budaya kerja, pengendalian internal dan tata kelola. Menurut Taufik (2019) Pencegahan *fraud* dapat diterapkan dengan empat indikator penting, yaitu: (1) Menghormati kode etik yang mudah dipahami dan dianggap oleh semua karyawan; (2) Mempekerjakan orang-orang yang jujur dan mendidik pegawai tentang kesadaran bahaya *fraud* atau kecurangan; (3) Tersedianya program yang

membantu masalah ekonomi, mental dan sosial pegawai; (4) Membangun tempat kerja yang positif.

2.1.5 Risk Management

Menurut Mishra et al., (2019) *risk management* sebagai metode dan proses dimana organisasi di seluruh perusahaan mengelola risiko dan menangkap peluang yang berhubungan dengan pencapaian tujuannya. Tujuan *risk management* adalah untuk membantu orang-orang yang bertanggung jawab atas berjalannya pengelolaan keuangan dalam mengidentifikasi risiko dengan benar dan membuat keputusan yang optimal. Selain untuk mencapai tujuannya, organisasi semakin mengadopsi proses manajemen risiko dan mengembangkan pendekatan manajemen risiko terintegrasi untuk mengelola peluang potensial dengan lebih baik (CHAIRMAN & GRM, 2009; Mcshane, 2018; Sharland, 2017). *Risk management* dapat berperan dalam mengidentifikasi dan menutup celah serta kekurangan dalam struktur pengendalian internal, sehingga mengurangi peluang karyawan terlibat dalam praktek *fraud* (Kassem & Higson, 2012; Pence et al., 2016).

Proses *risk management* mengikuti standar yang ada pada Australia/New Zealand (AS/NZS) 4360:2004. Sejumlah negara seperti Indonesia sudah menerapkan standar ini, untuk membangun arsitektur manajemen risiko mereka melalui pembuatan Baseline Assessment Indikator Manajemen Risiko Pemerintah Daerah (MRI-Pemda) diturunkan berdasarkan konsep dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai berikut:

1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan Konsultasi adalah suatu proses yang berkesinambungan dan berulang dalam menyediakan, berbagi, dan memperoleh informasi serta

menciptakan dialog dengan pemangku kepentingan mengenai risiko. Komunikasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko. Selain itu, konsultasi akan diadakan untuk mendapatkan umpan balik dan informasi guna mendukung pengambilan keputusan.

2. Penetapan Konteks Risiko

Penetapan Konteks Risiko, menentukan konteks risiko penting karena membantu menentukan dengan tepat kriteria mendasar dan sejauh mana penerapan risiko yang perlu dikendalikan. Penetapan kriteria risiko itu, antara lain: (1) kriteria kemungkinan risiko, ditentukan dengan menilai besarnya kemungkinan dan menetapkan kriteria untuk setiap kategori risiko (sangat jarang, jarang, kadang-kadang, sering dan sangat sering); (2) kriteria dampak risiko, ditentukan dengan menilai dampak dan menetapkan kriteria untuk setiap risiko (tidak signifikan, kurang signifikan, cukup signifikan, signifikan, sangat signifikan); (3) matriks analisis risiko, berisi kombinasi level kemungkinan dan level dampak agar dapat menetapkan besaran risiko.

3. Penilaian risiko

Penilaian risiko dilakukan lewat proses, antara lain: (1) identifikasi risiko, untuk menggali informasi tentang kejadian, penyebab, dan dampak risiko; (2) Analisis risiko, dilakukan untuk menilai risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya; (3) evaluasi risiko, dilakukan dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya melakukan upaya penanganan risiko lebih lanjut.

4. Penangan risiko

Penangan risiko adalah proses dalam memodifikasi penyebab risiko. Informasi tersebut adanya prioritas risiko dimana mengurutkan berdasarkan risiko. Risiko yang mempunyai prioritas lebih tinggi ditunjukkan dengan nilai besaran risiko yang lebih tinggi.

5. Monitoring dan Review

Monitoring memiliki tujuan dalam memonitor faktor atau penyebab yang mempengaruhi risiko. Hasil dari monitoring ini akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian kembali proses manajemen risiko. Review memiliki tujuan dalam mengontrol kesesuaian dan ketepatan seluruh pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penelitian Kwatinyas (2017) mengidentifikasi risiko operasional, risiko keuangan, risiko legal merupakan risiko yang utama. adapun penjelasan masing-masing risiko tersebut, antara lain:

1. Risiko operasional sebagai risiko kerugian akibat tidak memadainya atau kegagalan proses internal, orang, sistem atau peristiwa eksternal
2. Risiko keuangan sebagai risiko kerugian keuangan akibat yang terkait dengan tidak memadainya pengelolaan-pengelolaan keuangan
3. Risiko legal sebagai risiko kerugian akibat tidak mematuhi peraturan hukum atau pelanggaran peraturan UU

2.1.6 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO) adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas. Untuk memastikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan dalam sistem pengendalian internal maka dilakukan hal berikut: (a) keandalan pelaporan keuangan; (b) kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku; (c) efektivitas dan efisiensi operasi.

Selain itu, menurut PP No. 8 Tahun 2006 sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang didorong oleh manajemen untuk menjamin keyakinan yang memadai sehubungan dengan pencapaian efisiensi, efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta koordinasi penyajian laporan keuangan.

Tujuan Sistem pengendalian Internal dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 mencakup empat target yang harus dicapai, yaitu:

1. Efektifitas dan efisien kegiatan

Kegiatan suatu instansi pemerintah dikatakan efektif bila dilaksanakan sesuai dengan rencana dan hasilnya sesuai dengan sasaran dan sasaranannya. Selain itu, efisien pada umumnya berkaitan dengan penggunaan aset untuk mencapai hasil dan kinerja dimana suatu organisasi pemerintah dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan produksi yang berkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku (sumber daya) yang sesuai dengan pedoman.

2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan

Gagasan dasar bahwa informasi sangat penting dalam pengambilan keputusan mendasari tujuan ini. Informasi yang disajikan harus dapat diandalkan dan memberikan indikasi situasi yang akurat agar keputusan dapat diambil dengan benar. Jika laporan tidak memadai dan mengandung kesalahan, laporan tersebut akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan keputusan yang buruk atau berdampak negatif pada organisasi.

3. Pengamanan aset

Aset tersebut diperoleh melalui alokasi pengeluaran masyarakat, khususnya yang bersumber dari pajak dan bentuk penerimaan lainnya yang harus dikeluarkan untuk kepentingan Negara atau Daerah. Pengamanan aset merupakan isu penting yang mendapat perhatian besar dari pemerintah dan sektor swasta. Sebab, kecerobohan dalam mengamankan aset akan berujung pada pencurian, penyelewengan, dan bentuk penipuan lainnya.

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Ada perbuatan hukum untuk setiap jenis kegiatan dan transaksi. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu transaksi atau suatu tindakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku.

Adapun konsep pengendalian internal yang direkomendasikan COSO tertuang dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah konsep pengendalian internal sebagai struktur yang terkoordinasi. Ada lima komponen kebijakan dan prosedur yang perlu diterapkan untuk mencapai tujuan pengendalian yakni:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*), kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Hal ini dapat dilakukan, antara lain: (1) kepemimpinan yang kondusif dalam melakukan interaksi; (2) kepemimpinan yang memberikan keteladanan; (3) komitmen menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk peningkatan kompetensi
2. Penilaian resiko (*risk assessment*) merupakan penilaian risiko digunakan untuk mengenali dan memeriksa risiko-risiko yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) merupakan kebijakan dan strategi yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan dari pimpinan instansi pemerintahan. Kegiatan pengendalian terbagi atas, (a) pemisahan tugas; (2) penetapan atas indikator dan ukuran kinerja
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*), komunikasi tentang informasi harus dilakukan secara efektif. Untuk memberikan korespondensi yang layak, pejabat pemerintahan harus melakukan hal berikut: (1) mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan tepat waktu; (2) menyediakan dan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi yang ada; (3) terus melakukan pembaharuan pada sistem informasi
5. Pemantauan (*monitoring*) cara paling ampuh untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Pemantauan sistem pengendalian internal dilakukan

melalui: (1) pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan; (2) Adanya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.1.7 Teknologi Informasi

Menurut O'Brien (2005), teknologi adalah Jaringan komputer yang terdiri dari berbagai komponen pemrosesan informasi menggunakan berbagai jenis hardware, software, manajemen data, dan jaringan TI. sedangkan informasi menurut Aji (2005) adalah data yang terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat. Jadi, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, pendidikan, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Berbagai inovasi berbasis teknologi dilandasi dengan slogan era society 5.0 dimana masyarakat diharapkan mampu dalam menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan teknologi yang lahir di era revolusi industri 4.0. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia merupakan tujuan pemerintah daerah dalam mencapai *good governance*. Berbagai teknologi informasi dapat diimplementasikan dalam bentuk e-government, e-audit, e-procurement. Dalam bidang pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Salah satu bagian dari implementasi e-government adalah sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Sistem informasi tersebut terintegrasi dari daerah hingga pusat merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam upaya penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat (Djou et al., 2024). Dengan adanya sebuah sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi secara

signifikan berpengaruh pada pencegahan kecurangan di sektor publik (Ajao et al., 2022).

O'Brien (2005), menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kesuksesan atau kegagalan penerapan sistem informasi dalam suatu organisasi antara lain: dukungan manajemen eksekutif/manajemen puncak, keterlibatan sumber daya manusia, kejelasan penggunaan kebutuhan organisasi, kematangan perencanaan dan harapan organisasi yang nyata. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sistem informasi antara lain: kurangnya sumber daya manusia, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah, kurangnya dukungan manajemen eksekutif, inkompetensi secara teknologi serta perencanaan tidak tepat atau tidak matang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur teknologi sistem informasi (Alfiah, 2018), sebagai berikut:

1. Kualitas sistem

Kualitas sistem adalah kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi. Berfokus pada performa sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan *hardware*, *software*, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan kebutuhan pengguna.

- a. Mudah digunakan (*Ease for use*), suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut
- b. Kecepatan akses, suatu sistem dikatakan berkualitas jika memiliki kecepatan yang optimal dalam merespon.
- c. Keamanan sistem, suatu sistem dikatakan baik apabila dapat diandalkan dimana dapat menjaga data tanpa diakses pengguna secara bebas

2. Kualitas informasi merupakan hasil dari penggunaan sistem informasi oleh pengguna

a. Relevan

Relevan, suatu informasi dikatakan baik jika relevan dimana informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pengguna

b. Akurat

Akurat, suatu informasi harus akurat karena penting untuk pengambilan keputusan. Informasi yang akurat harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias

c. Ketepatan waktu, suatu informasi tidak boleh terlambat, informasi menjadi landasan pengambilan keputusan. Jika pengambilan keputusan terlambat maka akan berakibat fatal

3. Kualitas Layanan

Kualitas layanan sistem informasi merupakan pelayanan yang diperoleh pengguna dari pengembang sistem informasi, layanan dapat berupa update sistem informasi dan respon dari pengembang jika sistem informasi mengalami masalah.

a. Jaminan

Jaminan berhubungan dengan kemampuan teknisi dalam membangun sistem informasi yang berkualitas, dimana sistem informasi tersebut mampu menjamin kelancaran pekerjaan pengguna

b. Empati, sikap kepedulian pihak pengembang sistem informasi kepada pengguna ketika pengguna menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sistem informasi yang dibangun.

2.2 Tinjauan Empiris

Ada beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengaruh *risk management*, Sistem Pengendalian Internal, dan Teknologi Informasi terhadap

pencegahan *fraud* yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dharmawati et al., (2022) melakukan penelitian dengan judul *Mediation Effects of Fraud Prevention on the Relationship of Internal Control, Risk Management and Organizational Performance*. Hasil penelitian menemukan bahwa *internal control* dan *risk management* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, kemudian pencegahan *fraud* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *organizational performance*, kemudian *internal control* dan *risk management* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *organizational performance* melalui pencegahan *fraud*.
2. Safkaur (2023) melakukan penelitian dengan judul *The Role of Unethical Behavior in Moderating the Influence of Governance, Risk Management, and Compliance on Financial Fraud Prevention in Indonesian Local Governments*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pelemahan yang signifikan dari perilaku tidak etis terhadap hubungan antara tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan serta pencegahan penipuan keuangan di pemerintah daerah
3. Salawu et al., (2023) melakukan penelitian dengan judul *Internal Control System, Risk Management Practice and Fraud Prevention Among Selected State Governments In Southwestern Nigeria*. Hasil penelitian menunjukkan Control Activities, Information and Communication, Monitoring and Risk Management Praktis berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*
4. Tarjo et al., (2022) melakukan penelitian dengan judul *The effect of enterprise risk management on prevention and detection fraud in Indonesia's local government*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *risk*

management (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring) memiliki pengaruh terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud*.

5. Alazzabi et al., (2019) melakukan penelitian dengan judul *Risk management, top management support, internal audit activities and fraud mitigation support*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *risk management, top management support* dan *internal audit activities* berpengaruh terhadap *fraud mitigation*, efek mediasi *internal audit activities* yang signifikan pada hubungan *risk management* dan *top management support* terhadap *mitigation support*.
6. Lisnawati & Apollo (2020) melakukan penelitian dengan judul *The Relationship Between Internal Control, Regulation And Fraud With Risk Management As A Moderating Variable*. Hasil penelitian pengaruh positif dan signifikan hubungan pengendalian internal, regulasi, manajemen risiko dan kecurangan
7. Kopanchuk et al., (2021) melakukan penelitian dengan judul *Anti-Corruption Tools of Financial Risk Management in Public Administration*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuh alat pengelolaan seperti organisasi harus memiliki struktur dan sistem pengelolaan keuangan yang dapat dikelola, memastikan integritas dan efisiensi prosedur penganggaran dan perencanaan keuangan, mengadopsi aturan dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik, menciptakan dan menerapkan pengendalian keuangan yang ketat dan efektif, penguatan kapasitas sistem audit internal, penerapan peraturan dan prosedur yang transparan dan efektif mengenai audit eksternal, dan memastikan transparansi keuangan dan pelaporan publik secara berkala.

8. Kwatingtyas (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Pada Good Corporate Governance Serta Implikasinya Dalam Mencegah Fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap GCG, manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap GCG, pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dan manajemen risiko berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, GCG berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*
9. Shonhadji & Maulidi (2019) melakukan penelitian dengan judul *Is it suitable for your local governments? A contingency theory-based analysis on the use of internal control in thwarting white-collar crime*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas penilaian dan pemantauan risiko merupakan ukuran efektif untuk mengendalikan aktivitas organisasi, dan berpotensi dapat mendiagnosis potensi risiko (penipuan), yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Idealnya, aspek-aspek tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan jika organisasi ingin mencegah penyebaran berbagai potensi ancaman
10. Peltier (2018) melakukan penelitian dengan judul *A Model For Preventing Corruption* yang dimana untuk melihat sejauh mana korupsi secara global. Penelitian ini menjelaskan konsekuensi sosial dan ekonominya dan memperkenalkan model yang terdiri dari mekanisme tata kelola perusahaan, pengendalian internal dan analisis red flag yang dapat diterapkan organisasi untuk mencegah korupsi. Disini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal seperti pemisahan tugas organisasi yang tepat merupakan salah satu model pencegahan yang efektif.
11. Niyi et al., (2023) melakukan penelitian dengan judul *Assessing the Effectiveness of Internal Control Systems on Fraud Prevention and*

Detection of Selected Public Institutions of Ekiti State, Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Lingkungan pengendalian yang kuat mendorong budaya integritas, akuntabilitas, dan perilaku etis di seluruh organisasi. Dengan melakukan penilaian risiko, organisasi dapat secara proaktif mengidentifikasi dan memahami potensi risiko, sehingga memungkinkan membuat keputusan yang tepat dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dengan menerapkan aktivitas pengendalian yang kuat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kemungkinan kesalahan dan penipuan, serta meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas secara keseluruhan. Pemantauan memberikan jaminan bahwa pengendalian internal berfungsi sebagaimana mestinya, risiko dikelola secara efektif, dan tujuan tercapai. Sistem informasi dan komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi akurat, tepat waktu, dapat diakses, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan transparansi.

12. Koomson et al., (2020) melakukan penelitian dengan judul *Determinants of asset misappropriation at the workplace: the moderating role of perceived strength of internal controls*. Hasil penelitian ini memperlihatkan mekanisme pengendalian internal yang memadai dan kuat di tempat kerja adalah salah satu cara ampuh untuk mengurangi terjadinya penyelewengan aset di tempat kerja.
13. Fahmi et al., (2023) melakukan penelitian dengan judul *Analysis the Effect of Internal Control and Whistleblowing System in Fraud Prevention with Ethical Climate as Moderator*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Internal Control and Whistleblowing System berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pencegahan *fraud* dan *Ethical Climate* dapat memoderasi internal control dan whistleblowing system terhadap pencegahan *fraud*

14. Taufik (2019) melakukan penelitian dengan judul *The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact On Fraud Prevention*. Hasil penelitian menunjukkan Internal Control System dan Good Governance berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Kemudian Good Governance dapat memediasi Internal Control System terhadap pencegahan *fraud*
15. Alfiah, (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sistem Teknologi Informasi, Peran Auditor Internal, dan Budaya Lokal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintah Kota Makassar. Hasil penelitian Sistem Teknologi Informasi, Peran Auditor Internal, dan Budaya Lokal berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintah Kota Makassar
16. Izzaty et al., (2022) melakukan penelitian dengan judul *Examining the Role of Personality Traits, Digital Technology Skills and Competency on the Effectiveness of Fraud Risk Assessment among External Auditors*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan teknologi digital berpengaruh terhadap efektivitas penilaian risiko *fraud*, sedangkan ciri-ciri kepribadian dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap efektivitas penilaian risiko *fraud*.
17. Tanuwijaya (2023) melakukan penelitian dengan judul *The Effect Of Audit, Corporate Culture, Audit Committee, Inspection, Policies And Procedures, And It Adoption On Fraud Effectiveness Risk Management Banking Industry In Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal, inspeksi, dan adopsi TI ditemukan memiliki hubungan positif dan signifikan

dengan efisiensi manajemen risiko penipuan bank oleh para peneliti. Sedangkan variabel lain seperti budaya perusahaan, komite audit, dan kebijakan dan prosedur mempunyai hubungan negatif terhadap efektivitas manajemen risiko kecurangan, namun kebijakan dan prosedur tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas manajemen risiko kecurangan.

18. Sudarmanto et al., (2022) melakukan penelitian *Influence Of Quality Of Accounting Information System, Development Of Ethical Climate And Organizational Culture On The Effectiveness Of Corruption Risk Management And Its Impact On The Level Of Organizational Corruption At Government Agencies In Indonesia*. Hasil penelitian ini kualitas Sistem Informasi Akuntansi, pengembangan iklim etika yang berprinsip, dan pengembangan struktur organisasi yang hierarkis budaya mempengaruhi efektivitas manajemen risiko
19. Abbaszadeh et al., (2019) melakukan penelitian dengan judul *Association of information technology and internal controls of Iranian state agencies*. Hasil penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara teknologi informasi dan pengendalian internal (pengendalian administratif, keuangan, dan akuntansi, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan).
20. Ohoiway (2023) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengendalian Internal dalam Memediasi Sistem Informasi Akuntansi dan Peran Auditor Internal terhadap Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud, peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dan Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pencegahan fraud sedangkan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan fraud melalui pengendalian internal dan peran auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud melalui pengendalian internal.

21. Abiola (2013) melakukan penelitian dengan judul *The Impact of Information and Communication Technology on Internal Control's Prevention and Detection of Fraud*. Hasil penelitian ini penggunaan alat dan teknik berbasis ICT oleh auditor Internal berpotensi mencegah penipuan, dan alat dan teknik berbasis ICT tersebut efektif dalam mendeteksi penipuan

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Fraud merupakan Tindakan yang berlangsung secara konsisten oleh satu atau lebih anggota manajemen, mereka bertanggung jawab atas karyawan, pengaturan, atau kadang-kadang keduanya, termasuk menggunakan tindakan tidak etis untuk mencapai keadilan dan mendapatkan keuntungan ilegal. ACFE membagi *fraud* menjadi tiga, antara lain: (1) *aset Misappropriation Asset*; (2) *fraudulent statements*; (3) *corruption*.

Pencegahan *fraud* adalah langkah-langkah yang diambil untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dapat melibatkan penekanan pada budaya perusahaan, pengendalian internal, dan praktik tata kelola yang baik (Albrecht et al, 2011). Kegiatan untuk mencegah *fraud* dapat dilakukan dengan Menghormati kode etik, mempekerjakan orang-orang yang jujur dan mendidik pegawai tentang kesadaran bahaya *fraud*, tersedianya program yang membantu masalah ekonomi, mental dan sosial pegawai, membangun tempat kerja yang positif (Taufik, 2019).

Telah banyak usaha dilakukan untuk menghindari praktik kecurangan dengan harapan dapat mengantisipasi sejak awal. Salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen risiko, yang menjelaskan bahwa risiko adalah konsep yang menggambarkan ketidakpastian atau kemungkinan kejadian yang terkait dengan kendala dalam mencapai tujuan (Susilo & Kaho, 2018). Dengan melakukan manajemen risiko pada risiko operasional, risiko keuangan, risiko hukum, dapat mencegah terjadinya sebuah *fraud* (Kwatingtyas, 2017). *Risk management* sebagai metode dan proses yang digunakan oleh suatu organisasi

untuk mengelola risiko secara menyeluruh dan memanfaatkan potensi keberhasilan yang terkait dengan pencapaian tujuan mereka.

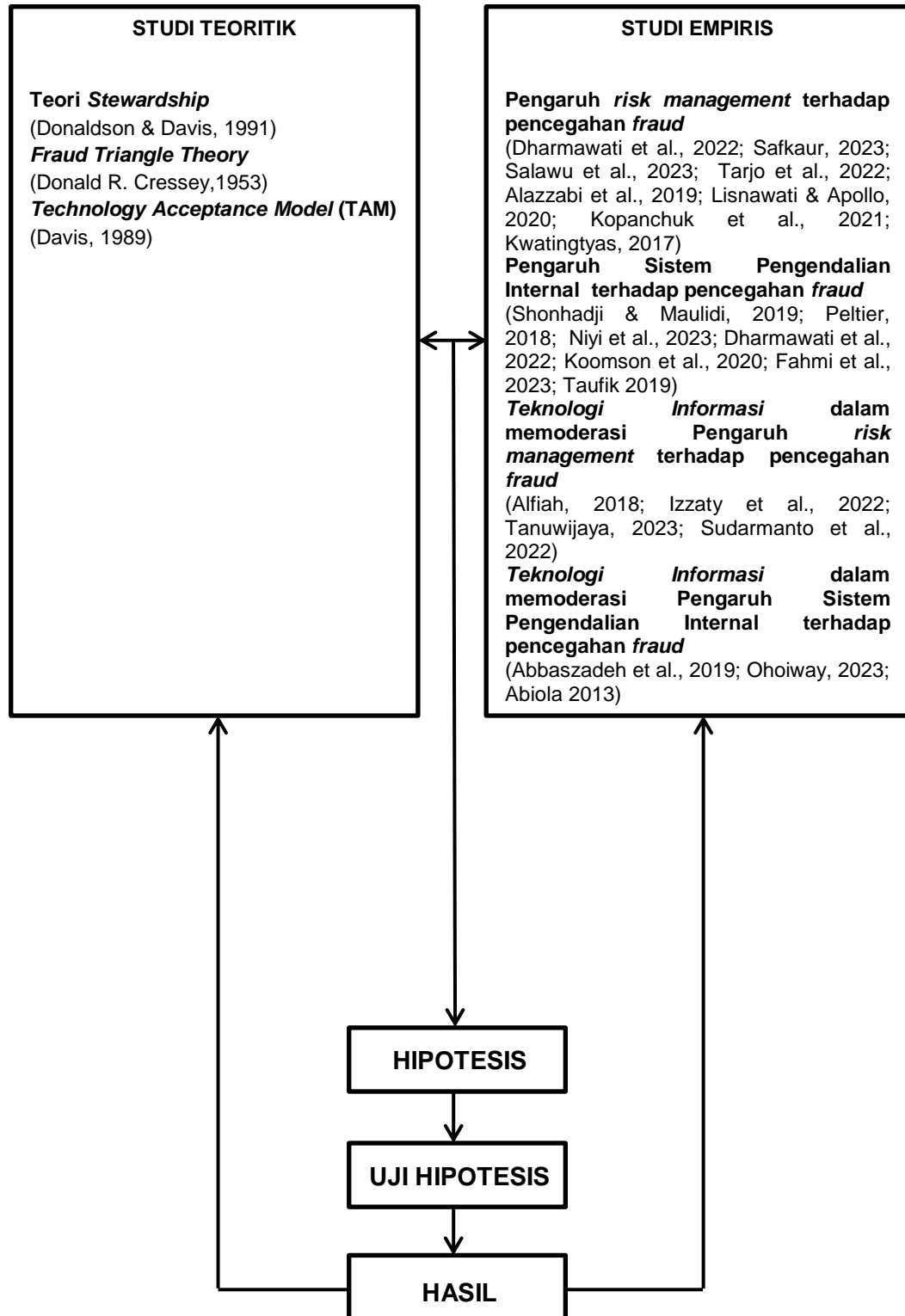
Pengaruh *risk management* terhadap pencegahan fraud didukung oleh teori *stewardship*. Teori ini mengasumsikan bahwa auditor yang bertindak sebagai steward akan memberikan kepuasan kepada pemerintah atau masyarakat yang bertindak sebagai *principal*. Auditor melakukan identifikasi dan mengevaluasi risiko terkait pengelolaan dana publik, melakukan pemantauan dan pemeriksaan berkala. Tujuan dari semua itu untuk memastikan bahwa dana publik dikelola bebas dari risiko yang dapat menimbulkan fraud. Sehingga hal ini dapat memenuhi harapan dari masyarakat atau pemerintah.

Selain *risk management*, sistem pengendalian internal adalah faktor yang penting dalam mencegah *fraud*. Sistem pengendalian internal dapat mencegah *fraud* dengan melakukan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan (Taufik, 2019). Mekanisme pengendalian internal yang memadai dan kuat di tempat kerja adalah salah satu cara ampuh untuk mengurangi terjadinya penyelewengan aset di tempat kerja (Koomson et al., 2020).

Kelemahan sistem pengendalian internal dapat menjadi faktor utama terjadinya fraud. Pengawasan yang buruk dan proses dokumentasi yang tidak tepat memberikan peluang untuk menyalahgunakan aset, yang paling buruk jika melibatkan beberapa orang yang bekerja sama untuk melakukan malpraktik ilegal tersebut. Untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang lemah, yang pada akhirnya akan mengurangi peluang terjadinya kecurangan (Zakaria, 2016). Hal ini sejalan dengan fraud triangle theory didefinisikan sebagai gagasan dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan atau menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi seseorang melakukan tindakan penipuan (Donald R Cressey, 1953).

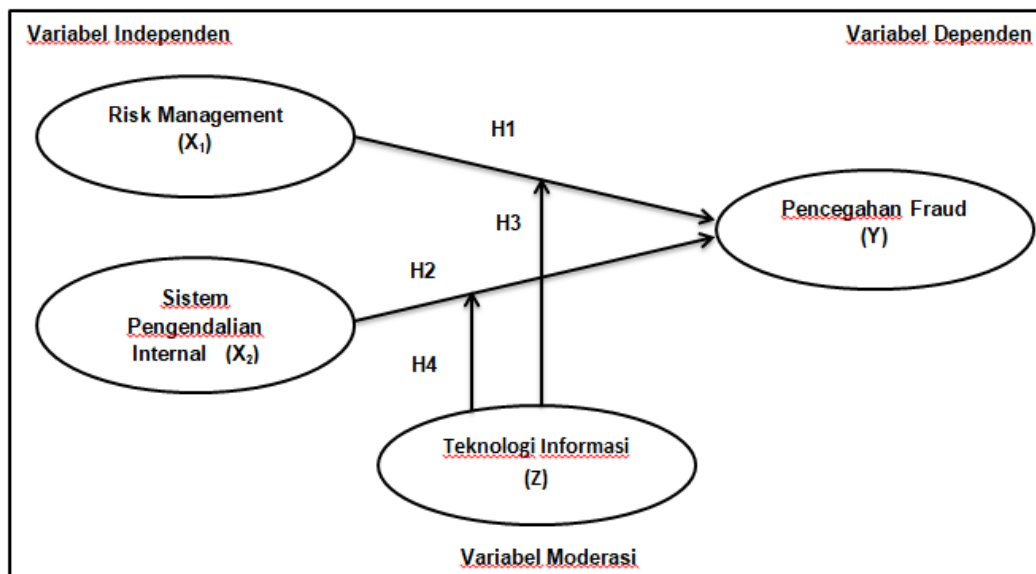
Untuk mendukung *risk management* dan sistem pengendalian internal, Teknologi informasi dianggap penting karena sangat membantu dalam melakukan berbagai analisis dan pengumpulan bukti (Arifuddin et al., 2022). Berbagai teknologi informasi dapat diimplementasikan dalam bentuk e-government, e-audit, e-procurement. Dalam bidang pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Salah satu bagian dari implementasi e-government adalah sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Langkah pemerintah untuk mengintegrasikan sistem informasi dari tingkat lokal hingga pusat adalah upaya dalam menerapkan teknologi informasi guna meningkatkan mutu layanan publik dan mengambil keputusan dengan lebih efisien dan akurat (Djou et al., 2024).

Technology Acceptance Model (TAM) atau model penerimaan teknologi merupakan suatu kerangka kerja yang dibuat untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang berperan dalam adopsi teknologi komputer oleh pengguna. Davis (1989) pertama kali mengemukakan konsep ini. Menurut Davis (1989), *Technology Acceptance Model* (TAM) adalah suatu teori sistem informasi yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana pengguna memahami dan menerapkan suatu teknologi informasi. *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam formulasi awalnya oleh Davis (1989) mencakup persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), sikap (*attitude*), niat perilaku (*behavioral intention*), penggunaan aktual (*actual use*), serta beberapa dimensi tambahan seperti pengalaman (*experience*) dan kompleksitas (*complexity*). Dari keenam konstruksi tersebut, ada dua faktor yang memiliki pengaruh utama terhadap sistem teknologi atau sistem informasi. Faktor pertama adalah persepsi akan manfaat atau kemudahan, sementara faktor kedua adalah persepsi kegunaan dalam penggunaan teknologi



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian kerangka dari kajian teoritis dan empiris sebelumnya, maka dibuatlah kerangka konseptual yang bisa dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

3.2.1 Pengaruh *Risk Management* terhadap pencegahan *fraud*

Pengaruh *risk management* terhadap pencegahan *fraud* didukung oleh teori *stewardship*. Teori ini mengasumsikan bahwa auditor yang bertindak sebagai *steward* akan memberikan kepuasan kepada organisasi yang bertindak sebagai *principal*. Auditor melakukan identifikasi dan mengevaluasi risiko terkait pengelolaan dana publik, melakukan pemantauan dan pemeriksaan berkala. Tujuan dari semua itu untuk memastikan bahwa dana publik dikelola bebas dari risiko yang dapat menimbulkan *fraud*.

Risk management sebagai metode dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko di seluruh organisasi dan memanfaatkan peluang yang terkait dengan pencapaian tujuan mereka (Mishra et al., 2019). *Risk management* dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menutup kesenjangan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, sehingga

mengurangi kemungkinan karyawan terlibat dalam aktivitas *fraud* (Kassem & Higson, 2012; Pence et al., 2016).

Ketika melibatkan *risk management* dalam perencanaan strategis, penerapan, dan proses akhir, maka akan membuat *risk management* lebih baik karena risiko akan dapat diidentifikasi lebih cepat (Harahap & Nengzih, 2021). Untuk mengelola risiko keuangan dalam mencegah korupsi, Kopanchuk et al., (2021) menghasilkan tujuh alat pengelolaan seperti organisasi harus memiliki struktur dan sistem pengelolaan keuangan yang dapat dikelola, memastikan integritas dan efisiensi prosedur penganggaran dan perencanaan keuangan, mengadopsi aturan dan prosedur pengelolaan keuangan yang baik, menciptakan dan menerapkan pengendalian keuangan yang ketat dan efektif, penguatan kapasitas sistem audit internal, penerapan peraturan dan prosedur yang transparan dan efektif mengenai audit eksternal, dan memastikan transparansi keuangan dan pelaporan publik secara berkala. Selain itu, Pemahaman terhadap peraturan penilaian risiko merupakan faktor penting dalam meningkatkan manajemen risiko. Dengan memahami peraturan dalam penilaian risiko berdasarkan undang-undang, maka pencapaian manajemen risiko akan terjamin sehingga hal ini akan berkontribusi pada pencegahan *fraud* (Lisnawati & Apollo, 2020).

Dengan memperluas cakupan *risk management* akan menghasilkan peluang yang lebih baik untuk mencegah dan mendeteksi *fraud* (Alazzabi et al., 2019). Pada hubungan *risk management* terhadap pencegahan *fraud*, mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan Kwatingtyas (2017) menunjukkan bahwa *risk management* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan Dharmawati et al., (2022) menunjukkan bahwa *risk management* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sejalan dengan

itu, Safkaur et al., (2023) mengemukakan bahwa *risk management* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Hal ini menunjukkan bahwa *risk management* yang dilakukan dapat digunakan sebagai alat pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikemukakan sebagai berikut.

H₁ : *Risk management* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

3.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud*

Kelemahan sistem pengendalian internal dapat menjadi faktor utama terjadinya *fraud*. Pengawasan yang buruk dan proses dokumentasi yang tidak tepat memberikan peluang untuk menyalahgunakan aset, yang paling buruk jika melibatkan beberapa orang yang bekerja sama untuk melakukan malpraktik ilegal tersebut. Untuk memperbaiki sistem pengendalian internal yang lemah, yang pada akhirnya akan mengurangi peluang terjadinya kecurangan (Zakaria, 2016). Hal ini sejalan dengan *fraud triangle theory* didefinisikan sebagai gagasan dalam mengamati penyebab terjadinya kecurangan atau menjelaskan faktor-faktor yang memotivasi seseorang melakukan tindakan penipuan (Donald R Cressey, 1953).

Berdasarkan teori ini terdapat tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan yang digambarkan dalam *fraud triangle*. Dharmawati et al., (2022) mengemukakan dari ketiga faktor tersebut, kesempatan (*opportunity*) merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisasi melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap kecurangan. Menurut Albrecht et al., (2011) ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan tindakan *fraud*, antara lain kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi *fraud*, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi *fraud* serta kurangnya jejak audit.

Mengantisipasi adanya tindakan kecurangan yang terjadi dalam suatu instansi, maka diperlukan sistem pengendalian internal. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas. Sistem pengendalian internal dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai guna dalam pencapaian tujuan dengan kategori berikut: (a) keandalan pelaporan keuangan; (b) kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku; dan (c) efektivitas dan efisiensi operasi.

Dominic Peltier (2018) dalam penelitiannya berjudul “*A Model For Preventing Corruption*” yang menyebutkan bahwa penerapan pengendalian internal seperti pemisahan tugas organisasi yang tepat merupakan salah satu model pencegahan yang efektif. Selain itu, pengendalian internal pada organisasi juga dapat mencegah *fraud* dengan lebih baik jika mereka secara aktif mengevaluasi dan menilai risiko dan kelemahan mereka terhadap *fraud* (Venter, 2007) dalam penelitian (Tarjo et al., 2022). Aktivitas penilaian risiko dan pemantauan merupakan ukuran efektif untuk mengendalikan aktivitas organisasi dan berpotensi dapat mendiagnosis potensi risiko (*fraud*) yang menghambat pencapaian tujuan organisasi (Shonhadji & Maulidi, 2019). Untuk bisa mencegah *fraud*, sosok keteladanan pemimpin sangat diperlukan karena akan menunjukkan komitmennya melalui perilaku dan tindakan untuk membangun tempat kerja menjadi lebih baik (Onesti & Palumbo, 2023). Informasi dan komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi akurat, tepat waktu, dapat diakses, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan transparansi (Niyi et al., 2023). Sehingga hal tersebut dapat mengoptimalkan dalam mencegah sebuah *fraud*.

Penelitian yang dilakukan Koomson et al., (2020) juga menetapkan bahwa mekanisme pengendalian internal yang memadai dan kuat di tempat kerja adalah salah satu cara ampuh untuk mengurangi terjadinya penyelewengan aset di tempat kerja. Sistem pengendalian internal diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindakan *fraud* di tempat kerja. Pada hubungan sistem pengendalian terhadap pencegahan *fraud*, mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan Taufik (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian yang dilakukan Fahmi et al., (2023) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif pencegahan *fraud*. Sejalan dengan itu, Salawu et al., (2023) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan dapat digunakan sebagai alat pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dikemukakan sebagai berikut.

H₂ : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*

3.2.3 Peran Teknologi Informasi dalam Memoderasi Pengaruh *Risk Management* terhadap pencegahan *fraud*

Penelitian ini menggunakan teori TAM khususnya pada elemen *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*. Dalam elemen tersebut dijelaskan bahwa penerapan suatu sistem atau teknologi harus bisa menghadirkan kemudahan dan kebermanfaatan dari berbagai sisi. Artinya dengan adanya teknologi informasi harus bisa memberikan manfaat sebagaimana fungsi yang diharapkan dengan kehadirannya sebagai suatu teknologi informasi. Teknologi informasi dianggap mudah dan membantu dalam mendukung praktik manajemen risiko dalam mencegah terjadinya *fraud*

Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi dalam mengelola data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, manipulasi data sehingga dapat menghasilkan informasi berkualitas, mencakup informasi relevan, akurat dan tepat waktu sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Aji, 2005; O'Brien, 2005). Pemerintah dapat mengambil langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pengambilan keputusan dengan menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi dari tingkat daerah hingga pusat seperti sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) (Djou et al., 2024). Hal ini sama disampaikan oleh Ajao et al., (2022) bahwa sistem informasi manajemen keuangan terintegrasi secara signifikan berpengaruh pada pencegahan kecurangan di sektor publik. Ketika teknologi informasi memiliki kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan yang baik ternyata dapat mencegah sebuah *fraud* (Alfiah, 2018). Implementasi teknologi informasi membantu kegiatan organisasi dalam menghasilkan informasi yang akurat sehingga sangat membantu dalam mencegah terjadinya kecurangan (Widianingsih et al., 2018). Salah satu keunggulan organisasi adalah kualitas informasinya yang tinggi. Ketika suatu sistem dapat menyediakan informasi yang dapat digunakan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat, dan dapat dipercaya, itu dianggap efektif (Febrianingsih, 2015)

Teknologi informasi merupakan salah satu bagian penting untuk *risk management* (Parent & Reich, 2009; Wilkin & Chenhall, 2010). Dengan sebuah teknologi, penggunaan *risk management* bisa berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Penelitian yang dilakukan Izzaty et al., (2022) menemukan adanya hubungan antara teknologi digital dan efektivitas dalam menilai risiko *fraud*. Penerapan teknologi informasi berdampak positif secara signifikan pada efektivitas manajemen risiko dalam mencegah kecurangan (Tanuwijaya, 2023).

Penelitian yang dilakukan Sudarmanto et al., (2022) menemukan sistem informasi akuntansi efektif dalam manajemen risiko untuk mencegah kecurangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Teknologi Informasi memoderasi pengaruh *Risk Management* terhadap pencegahan *fraud*

3.2.4 Teknologi Informasi dalam Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud*

Penelitian ini menggunakan teori TAM khususnya *pada elemen perceived ease of use* dan *perceived usefulness*. Dalam elemen tersebut dijelaskan bahwa penerapan suatu sistem atau teknologi harus bisa menghadirkan kemudahan dan kebermanfaatan dari berbagai sisi. Artinya dengan adanya teknologi informasi harus bisa memberikan manfaat sebagaimana fungsi yang diharapkan dengan kehadirannya sebagai suatu teknologi informasi. Teknologi informasi dianggap mudah dan membantu dalam mendukung pengendalian internal dalam mencegah terjadinya *fraud*

Teknologi informasi memiliki dampak untuk memperbaiki pelaksanaan pengendalian internal melalui penggunaan mekanisme yang lebih efisien dan transparan. Selain itu, teknologi ini dapat memperbaiki manajemen data dan memungkinkan pemantauan transaksi keuangan secara *real-time* (Boufounou et al., 2024). Sehingga hal ini dapat mencegah terjadinya sebuah *fraud*. Hal ini sama disampaikan oleh Alam et al., (2023) yang menyatakan bahwa e-government dapat mengurangi korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas. salah satu bentuk e-government adalah sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Kemudahan akses auditor selama tugasnya ke dalam sistem informasi keuangan pemerintah daerah, bersama dengan data yang akuntabel, akurat, dan

real-time dari sistem informasi pemerintah daerah, mempermudah proses auditor dalam membuat kesimpulan, mengambil keputusan, dan menyelesaikan audit dengan tepat waktu, sehingga meningkatkan kualitas audit secara positif (Akhriani & Hasan, 2023). Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Lonto et al., (2023) bahwa kualitas audit memengaruhi efektivitas audit dalam upaya pencegahan kecurangan. Teknologi informasi memiliki peran sentral dalam pencegahan kecurangan khususnya pada penilaian risiko (Oduro, 2018). selain itu, penelitian Abbaszadeh et al., (2019) menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara teknologi informasi dan pengendalian internal (pengendalian administratif, keuangan, dan akuntansi, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian dan pemantauan).

Teknologi informasi memiliki kapasitas untuk membantu mengurangi kompleksitas dalam tugas-tugas pemerintahan dan menghasilkan informasi yang dapat diandalkan, relevan, tepat waktu, lengkap, mudah dimengerti, dan teruji dalam konteks perencanaan, pengendalian, pengawasan, serta pengambilan keputusan oleh manajemen (Fitriani & Habib, 2019). Penelitian Abiola (2013) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi oleh auditor internal dalam melakukan pengendalian internal berdampak positif terhadap kemungkinan pencegahan kecurangan. Penelitian Ohoiway (2023) menunjukkan bahwa semakin besar pengaruh sistem informasi akuntansi akan meningkatkan pengendalian internal, pada akhirnya meningkatkan pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Teknologi Informasi memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan *fraud*